



KINERJA KEUANGAN PEMKAB KAPUAS HULU

Raih Opini Wajar dengan Pengeluaran

PUTUSSIBAU—Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2013. Kinerja keuangan Pemkab Kapuas Hulu mendapat opini wajar dengan pengecualian. Untuk itu kedepan diharapkan kinerja keuangan tersebut dapat terus ditingkatkan seluruh jajaran sehingga mendapat opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK-RI.

Hal itu disampaikan Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir SH pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu masa persidangan ke II dengan agenda pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (19/8) di ruang sidang DPRD. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kapuas Hulu Ade Zulkifli SAP dan dihadiri seluruh anggota DPRD dan pimpinan SKPD.

Pada sidang paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana SH MH wakil Ketua DPRD Yusup Habibi, Agustinus Ding serta jajaran pimpinan Forkorpimda, Bupati mengatakan, APBD Kapuas Hulu terus alami peningkatan, demikian juga penerimaan PAD. "Total pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu dari anggaran setelah perubahan sebar Rp1 triliun, 74 miliar lebih," jelasnya.

Lebih lanjut politisi PPP ini menjelaskannya, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk dari akuntabilitas dan transparan pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Agar masyarakat dapat menilai, mengkritisi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan program-program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah.

"Kritikan, saran dari anggota DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat, merupakan masukan bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik. Terutama dalam tata kelola pemerintahan, tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada kerja sama dan pengawasan seluruh stakholder," jelas Bupati. Mari bersama jaga keamanan dan ketertiban demi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. (aan)